



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN  
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, disepakati untuk penambahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai upaya peningkatan produksi pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480)
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1243),

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2020

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Para Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
13. Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia;
14. Para Kepala Dinas provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk;
15. Para Kepala Dinas kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk; dan
16. Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2020  
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)					NPK FORMULA H SUS	ORGANIK
		UREA	SP-36	ZA	NPK			
1	ACEH	68,960	16,921	14,011	45,020	K U	7,009	
2	SUMATERA UTARA	146,358	36,932	37,555	114,112	-	16,591	
3	SUMATERA BARAT	62,001	19,637	12,965	59,459	-	21,199	
4	J A M B I	29,743	13,804	10,917	58,566	-	5,600	
5	R I A U	31,777	10,942	10,219	49,664	-	7,766	
6	BENGKULU	24,847	6,942	4,822	25,330	-	3,485	
7	SUMATERA SELATAN	146,103	31,223	8,471	82,405	-	5,412	
8	BANGKA BELITUNG	25,058	3,877	2,386	19,406	-	9,327	
9	LAMPUNG	257,796	41,804	27,316	200,020	-	17,029	
10	KEP. RIAU	100	13	21	130	-	40	
11	DKI. JAKARTA	5	5	-	13	-	2	
12	BANTEN	66,473	12,498	-1,074	30,500	-	6,412	
13	JAWA BARAT	556,197	104,574	71,086	358,048	-	64,453	
14	D.I. YOGYAKARTA	41,074	2,815	7,879	26,127	-	3,474	
15	JAWA TENGAH	741,553	106,648	166,975	434,731	-	160,600	
16	JAWA TIMUR	967,612	102,990	358,926	600,566	-	336,429	
17	B A L I	38,494	1,175	2,542	24,288	-	3,639	
18	KALIMANTAN BARAT	35,159	8,346	4,135	67,353	-	7,224	
19	KALIMANTAN TENGAH	16,847	3,069	1,319	32,377	-	1,533	
20	KALIMANTAN SELATAN	40,586	4,944	4,817	43,615	-	3,899	
21	KALIMANTAN TIMUR	14,838	3,875	1,090	27,370	-	2,281	
22	KALIMANTAN UTARA	2,714	72	21	4,789	-	104	
23	SULAWESI UTARA	21,456	3,696	523	14,842	-	821	
24	GORONTALO	38,814	961	693	34,505	-	1,560	
25	SULAWESI TENGAH	37,685	1,727	6,597	29,377	5,725	2,077	
26	SULAWESI TENGGARA	25,522	3,066	3,160	22,297	-	3,881	
27	SULAWESI SELATAN	323,010	35,205	60,739	179,308	11,275	15,559	
28	SULAWESI BARAT	34,391	1,759	9,316	17,880	-	1,619	
29	NUSA TENGGARA BARAT	189,553	16,547	18,912	51,135	-	7,511	
30	NUSA TENGGARA TIMUR	27,598	2,120	624	19,129	-	1,211	
31	MALUKU	3,743	308	204	3,090	-	614	
32	PAPUA	7,699	1,318	556	8,690	-	1,419	
33	MALUKU UTARA	801	99	79	2,069	-	50	
34	PAPUA BARAT	900	88	50	1,789	-	170	
JUMLAH		4,025,467	600,000	850,000	2,688,000	-	720,000	

17,000

MENTERI PERTANIAN,

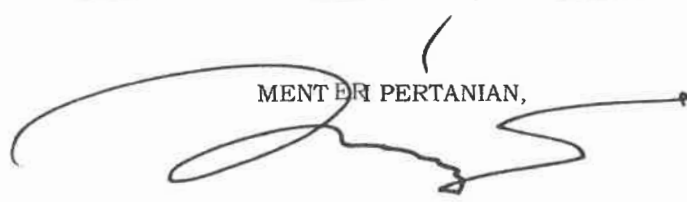
SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2020  
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)					
		UREA	SP-36	ZA	NPK	NPK FORMULA KHUSUS	ORGANIK
1	ACEH	68,960	16,921	14,011	45,020		7,009
2	SUMATERA UTARA	146,358	36,932	37,555	114,112		16,591
3	SUMATERA BARAT	62,001	19,637	12,965	59,459	-	21,199
4	J A M B I	29,743	13,804	10,917	58,566	-	5,600
5	R I A U	31,777	10,942	10,219	49,664	-	7,766
6	BENGKULU	24,847	6,942	4,822	25,330	-	3,485
7	SUMATERA SELATAN	146,103	31,223	8,471	82,405	-	5,412
8	BANGKA BELITUNG	25,058	3,877	2,386	19,406	-	9,327
9	LAMPUNG	257,796	41,804	27,316	200,020	-	17,029
10	KEP. RIAU	100	13	21	130	-	40
11	DKI. JAKARTA	5	5	-	13	-	2
12	BANTEN	66,473	12,498	1,074	30,500	-	6,412
13	JAWA BARAT	556,197	104,574	71,086	358,048	-	64,453
14	D.I. YOGYAKARTA	41,074	2,815	7,879	26,127	-	3,474
15	JAWA TENGAH	741,553	106,648	166,975	434,731	-	160,600
16	JAWA TIMUR	967,612	102,990	358,926	600,566	-	336,429
17	B A L I	38,494	1,175	2,542	24,288	-	3,639
18	KALIMANTAN BARAT	35,159	8,346	4,135	67,353	-	7,224
19	KALIMANTAN TENGAH	16,847	3,069	1,319	32,377	-	1,533
20	KALIMANTAN SELATAN	40,586	4,944	4,817	43,615	-	3,899
21	KALIMANTAN TIMUR	14,838	3,875	1,090	27,370	-	2,281
22	KALIMANTAN UTARA	2,714	72	21	4,789	-	104
23	SULAWESI UTARA	21,456	3,696	523	14,842	-	821
24	GORONTALO	38,814	961	693	34,505	-	1,560
25	SULAWESI TENGAH	37,685	1,727	6,597	29,377	-	2,077
26	SULAWESI TENGGARA	25,522	3,066	3,160	22,297	-	3,881
27	SULAWESI SELATAN	323,010	35,205	60,739	179,308	5,725	15,559
28	SULAWESI BARAT	34,391	1,759	9,316	17,880	-	1,619
29	NUSA TENGGARA BARAT	189,553	16,547	18,912	51,135	11,275	7,511
30	NUSA TENGGARA TIMUR	27,598	2,120	624	19,129	-	1,211
31	MALUKU	3,743	308	204	3,090	-	614
32	PAPUA	7,699	1,318	556	8,690	-	1,419
33	MALUKU UTARA	801	99	79	2,069	-	50
34	PAPUA BARAT	900	88	50	1,789	-	170
	JUMLAH	4,025,467	600,000	850,000	2,688,000	17,000	720,000

MENTERI PERTANIAN,




SYAHRUL YASIN LIMPO

10 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2020 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	(Ton)
UREA	4,025,467	390,680	395,426	319,985	357,88	319,564	374,291	299,025	225,257	338,67	402,440	402,439	201,205	
SP-36	600,000	111,630	72,111	62,356	62,820	45,324	50,159	26,378	15,000	38,559	46,268	46,268	23,127	
ZA	850,000	94,346	81,163	76,736	85,541	65,007	75,813	50,744	49,335	76,834	81,393	81,393	40,695	
NPK	2,688,000	305,317	281,546	249,490	283,312	214,625	265,471	221,851	198,423	170,747	204,888	204,888	102,442	
NPK FORMULA KHUSUS	71,000	-	-	44	308	272	554	657	577	3,648	4,376	4,376	2,188	
ORGANIK	720,000	44,540	41,235	41,774	61,813	42,839	53,507	50,383	54,340	82,396	98,870	98,870	49,433	
JUMLAH PUPUK	8,900,467	946,513	871,481	750,385	838,582	687,631	819,795	649,038	542,932	698,551	838,235	838,234	419,090	

MENTERI PERTANIAN,  
  
 SYAHRUL YASIN LIMPO



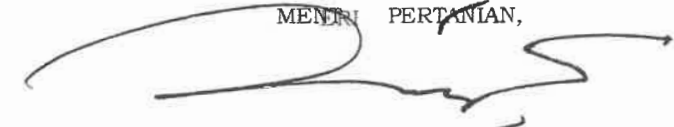
10 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2020 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	4,025,467	390,680	395,426	319,985	359,788	319,564	374,291	299,025	225,257	335,367	402,440	402,439	201,205
SP-36	600,000	111,630	72,111	62,356	62,820	45,324	50,159	26,378	15,000	38,559	46,268	46,268	23,127
ZA	850,000	94,346	81,168	76,736	85,541	65,007	75,818	50,744	49,335	67,834	81,398	81,398	40,695
NPK	2,688,000	305,317	281,546	249,490	268,312	214,625	265,471	221,851	198,428	170,747	204,888	204,888	102,442
NPK FORMULA KHUSUS	17,000	-	-	44	308	272	554	657	577	3,648	4,376	4,376	2,188
ORGANIK	720,000	44,540	41,235	41,774	61,818	42,839	53,507	50,388	54,340	82,396	98,870	98,870	49,438
JUMLAH PUPUK	8,900,467	946,518	871,481	750,385	838,582	687,631	819,795	649,038	542,932	698,551	838,235	838,234	419,090

MENTRI PERTANIAN,



SYAHRUL YASI LIMPO

LAMPIRAN II.1  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	68,960	1,631	10,427	8,203	6,728	4,650	5,623	5,247	4,484	5,492	6,590	6,590	3,295
2	SUMATERA UTARA	146,358	666	9,202	18,269	20,616	14,945	12,666	12,044	10,050	11,975	14,370	14,370	7,185
3	SUMATERA BARAT	62,001	3,861	6,997	5,352	5,309	4,359	4,739	4,728	4,796	5,465	6,558	6,558	3,279
4	J A M B I	29,743	1,423	4,420	3,145	2,404	1,286	2,120	1,736	1,482	2,932	3,518	3,518	1,759
5	R I A U	31,777	1,524	4,964	5,211	4,440	1,786	2,812	2,537	1,803	1,675	2,010	2,010	1,005
6	BENKULU	24,847	1,009	2,650	1,975	1,766	1,197	2,126	2,255	1,244	2,656	3,188	3,188	1,593
7	SUMATERA SELATAN	146,103	14,029	16,749	11,121	12,154	11,442	11,287	11,260	5,796	13,066	15,680	15,680	7,839
8	BANGKA BELITUNG	25,058	864	3,528	3,250	2,395	1,767	2,068	1,700	1,341	2,036	2,444	2,444	1,221
9	LAMPUNG	257,796	22,130	24,502	21,543	21,752	16,715	27,649	26,542	18,360	19,651	23,581	23,581	11,790
10	KEP. RIAU	100	-	-	67	-	-	-	33	-	-	-	-	-
11	DKI. JAKARTA	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-
12	BANTEN	66,473	10,002	7,787	3,847	2,543	5,030	9,259	6,273	1,909	4,956	5,947	5,947	2,973
13	JAWA BARAT	556,197	65,871	63,456	40,463	40,516	48,398	63,871	42,836	19,659	42,782	51,338	51,338	25,669
14	D.I. YOGYAKARTA	41,074	4,578	2,577	1,849	2,302	2,335	2,537	1,822	4,174	4,725	5,670	5,670	2,835
15	JAWA TENGAH	741,553	90,625	65,920	66,593	79,661	63,715	58,794	41,983	31,619	60,661	72,793	72,793	36,396
16	JAWA TIMUR	967,612	74,399	73,178	68,590	94,208	72,700	80,576	79,969	79,806	86,047	103,256	103,256	51,627
17	B A L I	38,494	2,487	3,040	2,617	2,414	2,023	3,067	3,374	3,029	4,111	4,933	4,933	2,466
18	KALIMANTAN BARAT	35,159	3,331	3,659	3,988	2,934	2,544	2,450	1,727	931	3,399	4,079	4,079	2,038
19	KALIMANTAN TENGAH	16,847	211	2,709	1,207	2,381	1,883	1,691	966	457	1,336	1,603	1,603	800
20	KALIMANTAN SELATAN	40,586	1,344	2,528	4,361	4,926	3,347	2,623	1,415	1,103	4,735	5,682	5,682	2,840
21	KALIMANTAN TIMUR	14,838	881	1,318	1,201	1,602	1,348	1,908	1,042	1,155	1,095	1,315	1,315	657
22	KALIMANTAN UTARA	2,714	7	197	354	136	219	145	68	21	392	470	470	235
23	SULAWESI UTARA	21,456	669	2,136	1,785	2,209	2,100	2,258	1,729	1,154	1,854	2,225	2,225	1,112
24	GORONTALO	3,814	4,626	2,794	2,629	2,225	2,995	3,970	2,060	1,852	3,665	4,398	4,398	2,198
25	SULAWESI TENGAH	37,685	3,283	4,833	3,154	2,045	2,695	5,456	3,710	2,109	2,600	3,120	3,120	1,560
26	SULAWESI TENGGARA	25,522	1,673	2,803	2,152	1,537	1,206	1,975	2,622	2,657	2,224	2,669	2,669	1,335
27	SULAWESI SELATAN	323,010	40,528	40,012	20,870	26,573	33,606	38,975	16,048	5,759	25,160	30,192	30,192	15,095
28	SULAWESI BARAT	34,391	2,635	3,789	2,966	3,511	2,610	3,455	2,961	2,453	2,503	3,003	3,003	1,502
29	NUSA TENGGARA BARAT	189,553	32,203	22,897	9,891	7,83	10,926	16,526	16,855	13,558	14,854	17,824	17,824	8,912
30	NUSA TENGGARA TIMUR	27,598	3,806	4,189	2,376	1,505	1,077	2,080	1,900	1,622	2,261	2,713	2,713	1,356
31	MALUKU	3,743	172	533	192	206	178	307	271	311	393	472	472	236
32	PAPUA	7,699	171	1,417	513	425	403	1,088	1,136	431	539	635	635	316
33	MALUKU UTARA	801	34	88	70	45	28	74	66	71	81	98	98	48
34	PAPUA BARAT	900	7	127	181	33	51	116	110	57	559	65	65	33
	JUMLAH PROPINSI	4,025,467	390,680	395,426	319,985	319,788	319,564	374,291	299,025	225,257	335,367	402,440	402,439	201,205

159,788

LAMPIRAN II.2  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK SP36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	16,921	1,665	1,940	1,544	971	387	1,993	2,202	1,412	1,202	1,442	1,442	721
2	SUMATERA UTARA	36,932	1,851	3,594	3,592	3,072	2,766	4,960	3,414	1,578	3,026	3,632	3,632	1,815
3	SUMATERA BARAT	19,637	2,404	1,747	2,376	1,238	1,151	1,814	1,552	1,090	1,566	1,880	1,880	939
4	J A M B I	13,804	1,118	3,018	1,597	1,754	1,065	1,014	425	144	917	1,101	1,101	550
5	R I A U	10,942	966	1,139	941	1,789	1,564	1,466	1,152	585	335	402	402	201
6	BENGKULU	6,942	1,328	1,267	1,242	974	417	505	325	21	216	259	259	129
7	SUMATERA SELATAN	31,223	3,166	3,709	2,841	3,383	3,240	3,227	1,716	602	2,335	2,802	2,802	1,400
8	BANGKA BELITUNG	3,877	45	884	189	710	487	390	315	239	155	185	185	93
9	LAMPUNG	41,804	6,096	6,556	4,191	4,195	2,924	4,695	3,135	2,205	1,952	2,342	2,342	1,171
10	KEP. RIAU	13	-	-	-	-	-	1	9	-	1	1	1	-
11	DKI. JAKARTA	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	12,498	4,941	2,273	827	197	-	-	-	-	1,065	1,278	1,278	639
13	JAWA BARAT	104,574	30,659	8,150	9,902	8,371	7,903	7,183	1,197	130	7,515	9,018	9,018	4,508
14	D.I. YOGYAKARTA	2,815	459	342	292	378	265	132	90	74	196	235	235	117
15	JAWA TENGAH	106,648	20,001	12,856	11,478	12,326	7,509	4,946	1,938	1,342	8,563	10,276	10,276	5,137
16	JAWA TIMUR	102,990	20,536	10,158	10,143	12,445	7,835	9,161	4,774	3,518	6,105	7,326	7,326	3,663
17	B A L I	1,175	37	29	66	77	75	20	63	48	190	228	228	114
18	KALIMANTAN BARAT	8,346	1,398	1,600	1,296	952	765	-	-	1	584	700	700	350
19	KALIMANTAN TENGAH	3,069	478	565	703	490	307	305	26	195	-	-	-	-
20	KALIMANTAN SELATAN	4,944	664	795	684	749	390	759	150	-	188	226	226	113
21	KALIMANTAN TIMUR	3,875	451	426	350	506	505	616	262	206	138	166	166	83
22	KALIMANTAN UTARA	72	5	5	1	9	1	4	3	-	11	13	13	7
23	SULAWESI UTARA	3,696	367	511	686	431	329	397	367	210	100	119	119	60
24	GORONTALO	961	5	-	5	12	-	9	84	166	170	204	204	102
25	SULAWESI TENGAH	1,727	418	243	441	124	156	72	104	18	38	45	45	23
26	SULAWESI TENGGARA	3,066	928	820	737	581	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SULAWESI SELATAN	35,205	6,766	5,681	3,570	4,029	3,257	3,458	1,838	1,033	1,393	1,672	1,672	836
28	SULAWESI BARAT	1,759	281	479	290	153	87	123	-	-	87	104	104	51
29	NUSA TENGGARA BARAT	16,547	3,703	2,527	1,705	1,500	1,661	2,483	1,093	75	450	540	540	270
30	NUSA TENGGARA TIMUR	2,120	645	405	372	195	145	264	66	28	-	-	-	-
31	MALUKU	308	83	35	53	13	9	7	15	7	22	26	26	12
32	PAPUA	1,318	146	350	199	137	119	128	49	69	30	36	36	19
33	MALUKU UTARA	99	11	5	13	16	5	15	7	4	6	7	7	3
34	PAPUA BARAT	85	9	2	25	23	-	12	7	-	3	3	3	1
	JUMLAH PROPINSI	600,008	111,630	72,111	62,356	62,820	45,324	50,159	26,378	15,000	38,559	46,268	46,268	23,127

LAMPIRAN II.3  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	14,011	1,357	1,751	1,888	1,798	1,063	1,195	1,466	1,388	476	572	572	285
2	SUMATERA UTARA	37,555	1,382	3,655	5,155	4,880	2,184	4,119	3,425	2,221	2,634	3,160	3,160	1,580
3	SUMATERA BARAT	12,965	1,264	1,067	1,100	1,198	752	958	921	881	1,206	1,447	1,447	724
4	J A M B I	10,917	915	1,051	1,171	1,125	475	806	657	610	1,027	1,232	1,232	616
5	R I A U	10,219	676	1,472	1,940	1,568	947	1,053	806	564	298	358	358	179
6	BENGGULU	4,822	327	613	640	613	290	375	402	246	329	395	395	197
7	SUMATERA SELATAN	8,471	167	463	526	470	530	544	231	1	1,360	1,631	1,631	816
8	BANGKA BELITUNG	2,386	36	522	872	156	5	11	-	-	196	235	235	118
9	LAMPUNG	27,316	1,124	1,582	1,848	1,685	1,110	2,025	2,449	2,277	3,304	3,965	3,965	1,982
10	KEP. RIAU	21	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	1,074	93	76	72	74	129	169	135	55	68	81	81	41
13	JAWA BARAT	71,086	7,585	6,622	5,626	6,293	6,496	7,923	5,266	5,873	4,851	5,821	5,821	2,909
14	D.I. YOGYAKARTA	7,879	996	703	573	695	659	675	506	209	716	859	859	429
15	JAWA TENGAH	166,975	20,188	15,855	16,108	18,701	13,704	12,939	7,676	5,661	14,036	16,843	16,843	8,421
16	JAWA TIMUR	358,926	42,224	31,228	30,189	37,033	27,605	29,492	18,344	22,474	30,084	36,101	36,101	18,051
17	B A L I	2,542	110	109	108	109	155	206	279	197	317	381	381	190
18	KALIMANTAN BARAT	4,135	383	550	448	432	530	798	140	15	210	252	252	125
19	KALIMANTAN TENGAH	1,319	254	204	226	253	107	107	27	29	28	34	34	16
20	KALIMANTAN SELATAN	4,817	100	181	252	281	180	105	50	74	899	1,078	1,078	539
21	KALIMANTAN TIMUR	1,090	178	214	204	169	162	103	40	-	5	6	6	3
22	KALIMANTAN UTARA	21	1	2	-	-	1	7	4	-	2	2	2	-
23	SULAWESI UTARA	2	34	36	80	27	17	41	46	41	50	60	60	31
24	GORONTALO	693	51	44	14	24	54	41	20	18	107	128	128	64
25	SULAWESI TENGAH	6,597	905	773	665	613	540	788	826	383	276	331	331	166
26	SULAWESI TENGGARA	3,160	377	499	393	235	107	330	255	223	185	222	222	112
27	SULAWESI SELATAN	60,739	9,079	7,479	4,152	5,051	5,276	6,919	3,491	3,582	3,928	4,713	4,713	2,356
28	SULAWESI BARAT	9,316	1,026	1,433	972	959	809	1,186	897	670	341	409	409	205
29	NUSA TENGGARA BARAT	18,912	3,365	2,822	1,419	999	1,043	2,766	2,291	1,253	739	886	886	443
30	NUSA TENGGARA TIMUR	624	57	48	39	23	18	10	6	25	100	119	119	60
31	MALUKU	204	37	14	18	19	17	28	16	21	9	10	10	5
32	PAPUA	556	46	85	31	31	40	73	40	36	44	52	52	26
33	MALUKU UTARA	79	4	6	6	7	2	20	3	7	6	7	7	4
34	PAPUA BARAT	50	5	4	1	20	-	1	8	-	3	3	3	2
	JUMLAH PROPINSI	850,000	94,346	81,163	76,736	85,541	65,007	75,813	50,744	49,335	67,834	81,393	81,393	40,695



LAMPIRAN II.4  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	45,020	3,708	5,621	6,442	5,140	4,060	3,980	4,030	2,431	2,402	2,882	2,882	1,442
2	SUMATERA UTARA	114,112	3,991	9,751	12,568	13,988	13,894	11,981	8,708	10,291	7,235	8,682	8,682	4,341
3	SUMATERA BARAT	59,459	4,812	5,982	5,714	6,777	4,749	5,568	5,362	4,651	3,961	4,753	4,753	2,377
4	J A M B I	58,566	3,942	8,035	5,963	6,367	2,870	5,248	4,795	3,555	4,448	5,337	5,337	2,669
5	R I A U	49,664	2,806	4,396	6,121	6,855	5,871	6,224	5,413	3,434	2,136	2,563	2,563	1,282
6	BENGKULU	25,330	4,406	4,575	3,352	3,186	1,446	2,975	2,280	1,423	422	506	506	253
7	SUMATERA SELATAN	82,405	8,493	10,871	9,033	9,567	6,881	8,674	8,478	5,191	3,804	4,565	4,565	2,283
8	BANGKA BELITUNG	19,406	83	2,441	1,545	2,273	1,995	2,995	2,510	2,061	876	1,051	1,051	525
9	LAMPUNG	200,020	18,586	21,248	19,241	18,090	13,088	21,440	19,468	14,195	13,666	16,399	16,399	8,200
10	KEP. RIAU	130	-	-	-	-	-	18	55	-	14	17	17	9
11	DKI. JAKARTA	13	-	-	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-
12	BANTEN	30,500	4,673	4,433	2,647	1,345	3,194	7,669	3,472	278	697	837	837	418
13	JAWA BARAT	358,048	56,091	42,047	30,395	28,227	32,032	41,044	27,668	22,162	19,596	23,515	23,515	11,756
14	D.I. YOGYAKARTA	26,127	3,648	2,468	1,974	2,123	2,175	2,236	1,494	1,939	2,018	2,421	2,421	1,210
15	JAWA TENGAH	434,731	54,508	39,206	42,809	49,748	34,215	33,761	30,919	28,726	30,210	36,252	36,252	18,125
16	JAWA TIMUR	600,566	65,225	48,559	49,431	68,332	46,606	51,619	49,774	62,593	39,607	47,528	47,528	23,764
17	B A L I	24,888	2,831	3,060	1,924	1,922	1,649	1,856	1,992	2,426	1,657	1,988	1,988	995
18	KALIMANTAN BARAT	67,353	5,781	6,835	7,623	3,736	4,212	7,242	4,937	4,183	5,701	6,841	6,841	3,421
19	KALIMANTAN TENGAH	32,377	999	4,005	3,313	3,047	2,456	3,753	2,466	2,896	2,361	2,833	2,833	1,415
20	KALIMANTAN SELATAN	43,615	4,316	6,050	4,405	4,189	2,716	3,891	2,480	1,898	3,418	4,101	4,101	2,050
21	KALIMANTAN TIMUR	27,370	1,317	2,548	2,535	2,912	2,062	2,644	1,695	1,551	2,537	3,032	3,032	1,515
22	KALIMANTAN UTARA	4,789	23	624	704	609	594	340	235	81	395	474	474	236
23	SULAWESI UTARA	14,842	1,067	1,641	1,506	1,571	1,254	1,510	1,304	834	1,039	1,247	1,247	622
24	GORONTALO	34,505	4,810	2,729	2,898	3,030	2,746	3,255	1,451	1,827	2,940	3,528	3,528	1,763
25	SULAWESI TENGAH	29,377	3,910	4,728	2,858	2,980	2,452	2,289	2,262	844	1,764	2,116	2,116	1,058
26	SULAWESI TENGGARA	22,297	2,501	2,238	2,780	1,601	1,224	1,595	2,376	1,951	1,508	1,809	1,809	905
27	SULAWESI SELATAN	179,308	20,567	20,635	11,228	13,077	13,387	20,338	16,488	10,717	10,225	15,861	15,861	7,931
28	SULAWESI BARAT	17,880	3,771	3,047	1,891	2,304	1,574	1,944	1,227	835	322	386	386	193
29	NUSA TENGGARA BARAT	51,135	12,981	8,972	4,423	2,727	3,248	5,791	5,502	2,951	13,218	1,362	1,362	681
30	NUSA TENGGARA TIMUR	19,129	4,303	2,463	2,856	1,283	1,002	1,619	1,710	1,122	693	831	831	416
31	MALUKU	3,090	284	486	194	265	142	243	288	224	1,445	289	289	145
32	PAPUA	8,690	524	1,450	823	673	665	1,416	684	831	406	487	487	244
33	MALUKU UTARA	2,069	284	186	188	181	54	216	150	183	157	188	188	94
34	PAPUA BARAT	1,789	76	216	96	187	112	97	178	139	172	206	206	104
	JUMLAH PROPINSI	2,688,000	305,317	281,546	249,490	268,312	214,625	265,471	221,851	198,423	107,777	204,888	204,888	102,442

LAMPIRAN II.5  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK NPK FORMULA KHUSUS BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SUMATERA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUMATERA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	J A M B I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	R I A U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENGGULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SUMATERA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KEP. RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	JAWA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	D.I. YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	B A L I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SULAWESI TENGAH	5,725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SULAWESI TENGGARA	-	-	-	36	175	72	157	225	130	1,233	1,479	1,479	739
27	SULAWESI SELATAN	11,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SULAWESI BARAT	-	-	-	8	133	200	397	432	447	2,415	2,897	2,897	1,449
29	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PROPINSI	17,000	-	-	44	308	272	554	657	577	3,648	4,376	4,376	2,188

LAMPIRAN II.6  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	7,009	339	627	296	818	467	455	474	449	771	925	925	463
2	SUMATERA UTARA	16,591	299	1,062	613	2,469	784	1,940	1,027	2,279	1,530	1,835	1,835	918
3	SUMATERA BARAT	21,199	455	367	277	325	542	776	592	1,383	4,121	4,945	4,945	2,471
4	J A M B I	5,600	104	454	22	95	162	40	280	563	970	1,164	1,164	582
5	R I A U	7,766	516	473	236	408	157	201	211	564	1,250	1,500	1,500	750
6	BENGKULU	3,485	596	281	111	365	69	300	197	492	269	322	322	161
7	SUMATERA SELATAN	5,412	447	660	98	121	162	378	491	308	687	824	824	412
8	BANGKA BELITUNG	9,327	60	280	15	947	99	20	362	117	1,857	2,228	2,228	1,114
9	LAMPUNG	17,029	1,475	1,210	477	1,057	449	752	1,023	1,466	2,280	2,736	2,736	1,368
10	KEP. RIAU	40	-	-	-	-	-	19	-	-	5	6	6	4
11	DKI. JAKARTA	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
12	BANTEN	6,412	547	545	520	248	571	846	763	372	500	600	600	300
13	JAWA BARAT	64,453	5,122	5,597	5,875	6,878	5,737	8,343	6,819	5,055	3,757	4,508	4,508	2,254
14	D.I. YOGYAKARTA	3,474	197	196	152	261	401	449	411	354	263	316	316	158
15	JAWA TENGAH	160,600	11,801	9,936	11,126	13,885	10,478	12,527	11,845	11,233	16,942	20,331	20,331	10,165
16	JAWA TIMUR	336,429	19,051	15,286	18,484	30,839	20,304	22,695	22,717	24,417	40,659	48,791	48,791	24,395
17	B A L I	3,639	165	194	83	174	101	75	163	118	642	770	770	384
18	KALIMANTAN BARAT	7,224	404	822	501	852	245	418	600	1,568	544	544	544	272
19	KALIMANTAN TENGAH	1,533	146	196	275	81	101	89	91	120	109	130	130	65
20	KALIMANTAN SELATAN	3,899	204	260	125	58	210	266	196	269	578	693	693	347
21	KALIMANTAN TIMUR	2,281	144	120	121	113	149	216	206	224	247	296	296	149
22	KALIMANTAN UTARA	104	5	4	20	9	13	11	6	9	11	11	11	5
23	SULAWESI UTARA	821	30	70	172	148	70	68	9	118	34	41	41	20
24	GORONTALO	1,560	11	8	5	11	12	37	26	93	339	407	407	204
25	SULAWESI TENGAH	2,877	176	47	141	57	41	138	40	170	316	380	380	189
26	SULAWESI TENGGARA	3,881	148	128	167	180	88	167	160	426	645	773	773	387
27	SULAWESI SELATAN	15,559	909	1,272	1,018	1,087	1,062	1,359	907	1,364	1,645	1,974	1,974	988
28	SULAWESI BARAT	1,619	125	19	63	170	108	235	161	137	150	180	180	91
29	NUSA TENGGARA BARAT	7,511	812	824	536	102	162	385	432	408	940	1,128	1,128	564
30	NUSA TENGGARA TIMUR	1,211	113	93	90	57	35	75	83	63	151	181	181	89
31	MALUKU	614	78	38	63	17	5	49	32	70	66	79	79	38
32	PAPUA	1,419	51	154	83	25	59	168	27	94	190	227	227	114
33	MALUKU UTARA	50	6	4	6	5	-	-	10	14	1	2	2	-
34	PAPUA BARAT	170	4	8	23	9	8	17	25	19	23	23	23	11
JUMLAH PROPINSI		720,000	44,540	41,235	41,774	61,813	42,839	53,507	50,383	54,340	82,396	98,870	98,870	49,433